

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kimberley Process Certification Scheme (disebut juga KPCS) adalah rezim perdagangan berlian legal internasional yang dibentuk pada tahun 2000 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2003 sebagai bentuk perlawanan dunia pada berlian konflik (Blood Diamond) atau berlian yang ditambang di daerah konflik yang dijual untuk membiayai gerakan oposisi dan separatis untuk berperang.<sup>1</sup> KPCS bergerak di sektor berlian mentah.

Pada tahun 2004 KPCS mendapatkan komplain dari DRC (republik demokratik Kongo) perihal kemungkinan adanya penyelundupan berlian ke RoC dari para artisanal dan oknum separatis di DRC<sup>2</sup>, komplain ini dilayangkan akibat susutnya angka ekspor DRC pada tahun 2004<sup>3</sup>. Beberapa saat setelah komplain dilayangkan, KPCS yang memiliki anggota sebanyak 43 negara pada kala itu memutuskan untuk melakukan peninjauan ke RoC pada bulan juni tahun 2004.<sup>4</sup>

Keputusan ini diambil oleh Tim Martin selaku Ketua dari KPCS karena dari data produksi dan ekspor Tim menemukan bahwasanya RoC telah mengekspor berlian sebanyak 5.2 juta karat selama tahun 2004, sementara

---

<sup>1</sup> Kimberleyprocess.com

<sup>2</sup> Laporan penulis Reuter, Tsoumou pada tahun 2007, mengutip ketua tim review Abbey Chikane menyebutkan bahwa komplain tersebut didapat dari DRC.

<sup>3</sup> Diamond republic of congo and diamond, t.t

<sup>4</sup> Katz, 2004.

kapasitas produksi RoC hanyalah 50.000 - 55.000 karat saja pada tahun 2004.<sup>5</sup> Diskrepansi yang mencapai seratus kali lipat, atau setara dengan 9000% kapasitas produksi RoC ini tidak dapat dijelaskan oleh RoC.<sup>6</sup> Hasil tim peninjau yang diterbangkan ke RoC pada bulan juni juga mengungkap bahwasanya pada tahun yang bersamaan RoC tidak memiliki catatan pembelian berlian, sehingga dapat disimpulkan bahwa 5.145.000 karat berlian yang lain merupakan berlian ilegal yang diselundupkan ke RoC oleh negara yang tidak diketahui secara pasti.<sup>7</sup> Meskipun demikian, tuduhan DRC dan dunia bahwa RoC adalah pusat penyelundupan berlian<sup>8</sup> di Afrika dibantah oleh Penasehat Menteri Pertambangan RoC yaitu Louis Marie Djama. Djama menyebutkan bahwasanya berlian konflik tidak memiliki urusan untuk berlarut lalang di negaranya, beliau menyebutkan bahwa ini hanyalah propaganda DRC yang ingin untuk mengeluarkan RoC dari KPCS<sup>9</sup>.

Selain itu, tim peninjau yang diutus oleh KPCS juga menemukan bahwasanya persyaratan atau skema berlian yang dirumuskan oleh KPCS dan wajib ditanamkan di negara partisipan seperti: (1) Sertifikat berlian, (2) konfigurasi berupa laporan pengawasan berlian setiap kali berlian diimpor atau diekspor dari RoC, (3) Statistik produksi, tidak diimplementasikan di RoC. Hasil

<sup>5</sup> Goldman, 2008. Between a RoC and a hard place: the republic of congo's illicit trade in diamonds and effort to break the cycle of corruption

<sup>6</sup> Goldman, 2008. Between a RoC and a hard place: the republic of congo's illicit trade in diamonds and effort to break the cycle of corruption

<sup>7</sup> Katz, 2004. Tim peninjau Report and a Revised KP List, 'Congo and the absence of related imports'; Goldman,2008; Berikut juga dengan penjelasan '....Demokratik Republik Kongo-tetangga yang hanya berseberangan sungai dengan RoC dan Central African Republic dcurigai sebagai negara yang menyelundupkan berlian ke RoC'

<sup>8</sup> Dietrich, 2002.

<sup>9</sup> Kurti, 2005.

dari tim review ini menunjukkan bahwasanya RoC terbukti tidak melakukan kepatuhan pada KPCS, dengan melanggar semua persyaratannya.<sup>10</sup>

Meskipun demikian, pada bulan Agustus tahun yang sama, RoC serta merta menghentikan produksi berliannya.<sup>11</sup>

Gambar 1.1 *Tabel Produksi komoditas mineral RoC 2003 – 2007*<sup>12</sup>

Commodity <sup>3</sup>		2003	2004	2005	2006	2007
Cement	metric tons	--	--	100,000	100,000	100,000
Diamond	carats	30,000	50,000	-- <sup>r,4</sup>	-- <sup>r,4</sup>	-- <sup>4</sup>
Gold, mine output, Au content	kilograms	175	160	120	100	100
Lime	metric tons	390	400	400	400	400
Liquid petroleum gas, propane	thousand 42-gallon barrels	1,900	919 <sup>5</sup>	766 <sup>5</sup>	2,960 <sup>5</sup>	1,000
Petroleum:						
Crude	do.	81,646 <sup>5</sup>	82,069 <sup>5</sup>	92,550 <sup>5</sup>	93,261 <sup>5</sup>	81,700 <sup>5</sup>
Refined	do.	2,700	2,700	3,000	3,500	3,500

<sup>1</sup>Revised. do. Ditto. --Zero.

<sup>1</sup>Estimated data are rounded to no more than three significant digits.

<sup>2</sup>Table includes data available through June 16, 2008.

<sup>3</sup>In addition to the commodities listed, crude construction materials (for example, clay, sand and gravel, and stone) were produced, but available information is inadequate to make reliable estimates of output.

Natural gas is also produced, but output is flared, reinjected, or vented.

<sup>4</sup>No official diamond production was reported. Artisanal production and diamond exploration continued.

<sup>5</sup>Reported figure.

Penghentian produksi berlian ini juga dilakukan RoC selama tiga tahun berturut turut yakni selama tahun 2005, 2006, 2007<sup>13</sup>. Hal ini tidak lain adalah preskripsi tim peninjau, yakni untuk menghentikan produksi berlian dan memperbaiki sektor yang dibicarakan lebih baik.<sup>14</sup> Begitu juga dengan perdagangan berlian yang secara berangsur dihentikan oleh RoC. Preskripsi

<sup>10</sup> Katz, 2004

<sup>11</sup> Mobbs, 2010, USGS 2007 Minerals Yearbook: The mineral Industry of Congo (Brazzaville), U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey.

<sup>12</sup> US Mineral yearbook, 2010.

<sup>13</sup> US Mineral yearbook, 2010.

<sup>14</sup> Krawitz, 2007.

lainnya adalah saran tim peninjau untuk merubah UU pertambangan RoC agar lebih ketat dan dapat merekognisi sertifikat KPCS sebagai sesuatu yang sah, berikut mengembangkan sistem kontrol internal dan menciptakan komisi survey geologi untuk menilai kapasitas produksinya.<sup>15</sup>

RoC juga melakukan revisi pada perundang undangan pertambangannya dalam waktu satu bulan setelah tim peninjau berkunjung (Agustus) revisi perundangan ini dilakukan untuk menyesuaikan peraturan KPCS terkait ekspor dan impor<sup>16</sup>. Secara mengejutkan, seluruh preskripsi lainnya juga dipenuhi oleh RoC secara bertahap. Pada tahun 2005 RoC mengundang ilmuwan geologi dari Perancis untuk menaksir kapasitas produksinya perbulan, juga untuk mengontrol perdagangan berlian<sup>17</sup>. Hingga pada tahun 2007 RoC mampu menerapkan skema KPCS dalam rupa sertifikat bagi berlian yang diimpor maupun diekspor dari negaranya yang mana sebelumnya tidak diimplementasikannya.

KPCS sendiri dalam rentang waktu 2003 hingga 2007 melakukan banyak perubahan dalam rezimnya, berikut dalam hal peraturan maupun pembuatan keputusan, baik dalam rangka meningkatkan transparansi melalui peraturannya maupun dalam rangka pembuatan keputusan.<sup>18</sup>

Berikut adalah tabel yang menunjukkan bagaimana RoC mematuhi preskripsi yang diberikan oleh KPCS paska 2004 – 2007.

<sup>15</sup> Krawitz, 2007.

<sup>16</sup> IMF Report “Republic of Congo: Second Review Under the Three-Year Arrangement Under the Poverty Reduction and Growth Facility, and Request for Waiver of Nonobservance of Performance Criteria, Rephasing, and Extension of Arrangement—Staff Report; Staff supplement; Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director”

<sup>17</sup> Freedom in the world, Congo republic, Brazzaville.

<sup>18</sup> Dokumen KPCS. Annex 2003, keputusan administratif dalam rentang waktu 2004 - 2007

Tabel 1.2 Timeline RoC dalam memenuhi preskripsi KPCS

<b>Preskripsi</b>	<b>Tahun dilaksanakan</b>
<b>Menghentikan Produksi berlian</b>	2004
<b>Menghentikan perdagangan berlian konflik</b>	2007
<b>Memperbaiki Undang Undang pertambangan untuk memperbaiki kontrol internal<sup>19</sup></b>	2005
<b>Mengadakan survey geologis untuk mengukur potensi pertambangan berlian yang dapat dihasilkan untuk mengetahui kapasitas pertambangan RoC pertahunnya</b>	2005
<b>Memastikan Undang Undang berlian konflik dijalankan</b>	2007

Ujung dari seluruh preskripsi yang ditaati oleh RoC ini adalah dilakukannya prosedur *follow up* terhadap kemajuan RoC oleh KPCS pada tahun 2007 yang diketuai oleh EC. EC selaku ketua KPCS kemudian mengutarakan hasil dari kunjungan tim peninjau yakni RoC berhasil memenuhi semua preskripsi tim peninjau dan dinyatakan patuh terhadap rezimnya<sup>20</sup>.

Hal ini tentunya menarik untuk dibahas, karena setelah berdirinya KPCS, ada pergeseran otoritas dalam mengatur perdagangan berlian yang sebelumnya

<sup>19</sup> Mining code Republic of Congo, Law number 4 of April 11, 2005 dalam Cabemery.org 2013/10/14/mining-legislation-in-the-republic-of-the-congo/

<sup>20</sup> Reuters, 2007. Congo Republic sheds 'blood diamond' tag. "A statement issued by the 48-nation Kimberley Process after a four-day meeting in Brussels said Congo Republic had been readmitted"

dilaksanakan oleh WTO dan ditekan oleh PBB kini dilaksanakan oleh KPCS sebagai pelaku utama dengan peraturannya yang banyak mengalami perubahan dalam perspektif untuk menjadikan skemanya lebih efektif dalam menangani ketidak patuhan anggotanya. Saat kita mengasumsikan bahwa sebuah rezim tidak efektif, utamanya pada kasus RoC yang baru menjadi patuh pada tahun 2007, pada saat yang bersamaan rezim terus mengalami perubahan untuk membuat sistemnya berjalan lebih sesuai agar partisipan dapat terdorong untuk menjadi patuh. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas, perubahan seperti apa yang dilakukan oleh KPCS dan bagaimana perubahan itu berkontribusi dalam merubah RoC untuk melakukan kepatuhan?

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana perubahan yang dilakukan KPCS dapat mendorong RoC untuk melakukan kepatuhan pada preskripsi rezimnya pasca 2004 - 2007?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat untuk mengobservasi perubahan dalam rezim KPCS yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan RoC pasca 2004. Studi ini penting untuk sumbangsih penelitian tentang rezim, diantaranya adalah bagaimana perubahan dalam rezim berkontribusi dalam merubah perilaku negara.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

Status berlian sebagai mineral langka yang kini menjadi disorot oleh institusi dan lembaga pengamat humaniter dunia ini tidak lepas dari sumbangsih

banyak peneliti yang meneliti hubungan antara berlian konflik dan perang, contoh dari peneliti tersebut adalah Collier dan Hoeffler, yang juga menemukan korelasi antara negara-negara Afrika yang kaya akan sumber daya dengan intensitas dan durabilitas perang.<sup>21</sup>

Beberapa cara yang digunakan di dunia dalam memperkecil konflik, dan menciptakan peraturan dalam rangka mengatur perilaku negara adalah dengan menciptakan rezim.

Rezim dalam definisi Krasner adalah seperangkat peraturan yang implisit maupun eksplisit, norma maupun prinsip, dan memiliki prosedur pengambilan keputusan pada aktor yang terlibat.<sup>22</sup> Menurut Krasner, rezim juga hadir dalam institusi yang ditandai dengan perjanjian antara dua negara atau lebih. Rezim juga bersifat longgar dan tidak memaksa (voluntir), oleh karenanya peraturannya dapat hanya disebut dengan norma<sup>23</sup>. Meskipun demikian menurut Young, dengan kemampuan rezim yang elastis, rezim dapat pula memperengaruhi perilaku aktor terkait isu yang menjadi tujuan rezim<sup>24</sup>.

Kemampuan rezim untuk merubah perilaku negara ini juga telah terlihat dalam banyak kasus dan kondisi, berikut ini adalah beberapa contoh perubahan perilaku negara akibat rezim dalam kondisi-kondisi tertentu.

<sup>21</sup> Collier dan Hoeffler, t.t Greed and Grievance in Civil War, pp 2. Dicontohkan dengan kasus Angola hingga Kamboja "rare. Empirically, many rebellions appear to be linked to the capture of resources: diamonds in Angola and Sierra Leone, drugs in Colombia, and timber in Cambodia."

<sup>22</sup> Krasner, 1982. Structural cause and regime consequences: regimes as intervening variables. hal. 2

<sup>23</sup> Krasner, 1982. Structural cause and regime consequences: regimes as intervening variables. hal. 2

<sup>24</sup> Young dan Levy, 1999. The effectiveness of Environmental regimes. hal. 25; Young, 1991; Rugie, 1975. Pp 559; Oberthur, 2001; Stokke, 2001 hal 2.

#### 1.4.a Tabel perubahan perilaku negara akibat rezim

Tahun	Rezim	Negara	Hasil
2002	WTO	AS	EU melaporkan AS ke Dispute Settlement Body WTO akibat proteksi lokal dari tarif baja impor, AS membayar denda sesuai sanksi WTO <sup>25</sup> .
2004 – 2006	Protokol Kyoto	Cina &India	Ratifikasi perjanjian dan menjalankan Clean Development Mechanism <sup>26</sup>
1988	Packwood– Magnuson Amendment	Jepang	Menghentikan perburuan paus di Jepang <sup>27</sup>
2010	Protokol Kyoto	EU	Mencapai standar pengurangan emisi karbon <sup>28</sup>

<sup>25</sup> Mann dan Aiden, 2002. EU hits at US 'unilateralism' on steel. Financial Times, 14 Maret, 2002.

<sup>26</sup> Zhang, 2009. *Towards an effective implementation of clean development mechanism projects in China*. Dimulai dari 2002 hingga 2004, CDM di dilakukan di China berkat Protokol Kyoto dijalankan dengan proses bertahap dan proses funding oleh World Bank sebesar US\$ 970.000 (2003 – 2004) dan C\$ 5.000.000 oleh Kanada (2002 – 2004) dan US\$ 1.458.000 oleh UN Foundation untuk proses perkembangan CDM di Cina.

<sup>27</sup> Black, 2007. *Did Greens help kill the whale?* (“.....But in bilateral discussions, the two governments reached an agreement. Japan would cease whaling in 1988, two years beyond the moratorium date, and withdraw its objection; in return, Ronald Reagan's administration agreed not to take action under Packwood-Magnuson or Pelly.”) AS yang memainkan peran sebagai supporter anti whaling memaksa jepang untuk menghentikan whaling dengan ancaman menjatuhkan amandemen packwood magnuson (fishering limit). Perilaku keduanya berubah akibat rezim IWC.

<sup>28</sup> Henson, 2010. *The rough guide to climate change ; What is the Kyoto protocol and has it made any difference?* , 2011. The Guardian.com “Some countries and regions, including the European Union, were on track by 2011 to meet or exceed their Kyoto goals”



1990	International Whaling Commission	Antigua	Menyetujui catch-limit paus yang diadakan oleh UNCHE dan IWC <sup>29</sup>
1987 – 1993	Helsinki Protocol	Negara – Negara Eropa	Reduksi emisi sulfur lebih dari 50% secara total pada Transboundary Flux dicapai oleh seluruh partisipan <sup>30</sup>
1988	Sofia Protocol	Inggris	Ditandatangani Inggris, dan setelahnya menginisiasi perjanjian lebih jauh tentang reduksi sulfur <sup>31</sup>
1960 – 1962	Apartheid Regime	Inggris	Membentuk British Anti Apartheid Movement (AAM), dan memboikot ekspor Afrika Selatan di negaranya secara halus <sup>32</sup>
Awal 1990	The Acid Rain Regime	Republik Ceko	Termasuk negara CEE yang berat mengimplementasikannya, namun akhirnya meraih hasil reduksi paling dramatis <sup>33</sup> .

<sup>29</sup> Vreeland and Drysdale, 2005. 2001

<sup>30</sup> United Nation Comission Economy for Europe, t.t. Protocol on the Reduction of Sulphur Emissions. Pengurangan emisi sulfur dengan target 30% mulai dilaksanakan pada tahun 1987 dengan 21 partisipan. Pada tahun 1993 lebih dari 50% reduksi terlaksana dengan data terlampir, seluruh partisipan secara individu sudah mencapai target 30% dan 11 partisipan bahkan melakukan reduksi sulfur secara individu sebesar 60%.

<sup>31</sup> Miles et al, 2002. The Environmental Regime effectiveness : confronting Theory with evidence. hal. 199

<sup>32</sup> African National Congress, The origins of the British Anti-Apartheid Movement.

<sup>33</sup> Andonova, 2007. hal 152

Tabel diatas memberikan gambaran yang cukup nyata bahwasanya rezim memiliki dimensi yang disebutkan oleh Young, yakni kemampuan untuk merubah perilaku negara, namun tabel diatas tidak menjelaskan bagaimana cara rezim dalam mengarahkan dan mendevisasi perilaku negara ke arah yang diharapkan oleh rezim tersebut.

Pada dasarnya, rezim sebenarnya memiliki banyak cara untuk merubah perilaku negara, salah satu nya adalah dengan cara memberikan ‘Punishment’ atau “sanction” kepada negara partisipan untuk merubah perilakunya. Pada dasarnya, menurut Young bagaimana rezim mampu merubah perilaku negara dikembalikan kepada jenis rezim tersebut.

#### **1.4.1 Teori Rezim Oran Young : Rezim sebagai Pendorong Kerjasama dalam menjelaskan kepatuhan negara**

Menurut Young dalam bukunya yang berjudul *the effectiveness of international regime : causal connection and behavioral mechanism*<sup>34</sup> perjanjian yang mengawali sebuah rezim akan menuturkan peraturan dari kekuatan, otoritas, hak, liabilitas dan kewajiban behavioral dalam sebuah rezim. Bagaimana kewajiban behavioral ini dilakukan kemudian adalah tolak ukur kepatuhan partisipan terhadap rezim.

Young juga menyebutkan bahwasanya rezim yang efektif adalah rezim yang dapat menghubungkan perilaku yang dikehendaki dalam rangka

---

<sup>34</sup> Young dan Levy, 1999

menghilangkan permasalahan yang dialamatkan dengan dibentuknya rezim.<sup>35</sup> Young dalam bukunya juga menyebutkan bahwasanya rezim memiliki banyak jenis, yang dapat dialamatkan pada bagaimana rezim difungsikan dan bagaimana realita yang terjadi dalam hubungan antara perilaku negara dan institusi. Menurut Young rezim dapat menjadi rezim pendorong kerjasama atau yang disebut *Enhancer of Cooperation* yang mana menjelaskan perilaku negara yang menjadi patuh dikarenakan untuk memperkuat suatu tujuan kerjasama, dan bagaimana institusi kemudian mewadahnya<sup>36</sup>.

Rezim yang merupakan rezim pendorong kerjasama memiliki beberapa ciri yang pertama adalah, tujuan rezim yang mana didirikan sebagai mekanisme untuk mengurangi permasalahan yang bersifat kolektif. Yang kedua, dengan didirikannya rezim untuk mengurangi permasalahan kolektif tersebut partisipan mendapatkan hasil kolektif. Yang ketiga adalah rezim tersebut memiliki cara untuk merubah perilaku partisipan, yaitu dengan cara menghukum atau mengurangi insentif untuk melukai partisipan.

Menurut Young dan Levy, rezim sebagai pendorong kerjasama memiliki cara untuk merubah perilaku partisipan yaitu dengan cara 1.) menghukum pelanggar rezim maupun dengan memperpanjang tabir masa depan yang tidak diketahui, ataupun memutuskan untuk mempraktekkan kemampuannya untuk menyakiti partisipan dengan cara mengurangi insentif yang didapatkan oleh partisipan.

---

<sup>35</sup> Young. 1991.

<sup>36</sup> Young dan Levy, 1999. *The effectiveness of Environmental regimes*. hal 20 - 25

2.) Dengan menciptakan skema yang transparan, Young dan Levy menyebutkan bahwa rezim dapat menghilangkan rasa ketakutan partisipan dari dicurangi dengan menciptakan alat pengukuran yang di desain untuk meningkatkan transparansi perilaku aktor relevan, hal ini mencerminkan bahwa semakin bertambah transparansinya maka kepatuhan akan semakin meningkat karena skema yang dijalankan memberikan celah semakin kecil bagi partisipan untuk melakukan kecurangan.

Sehubungan dengan kepatuhan partisipan dan kewajiban behavioral mereka dalam rezim, menurut Down, Barsoom dan Keohane, atau para pengamat kepatuhan dalam rezim, semakin ekstensif perubahan behavioral yang dibutuhkan oleh rezim internasional maka insentif untuk mengelak akan semakin besar, oleh karenanya semakin dalam komitmen perjanjian rezim tersebut maka rezim harus semakin elastis, semakin berkembang dan mampu melakukan perubahan atau penyesuaian dalam rangka mendorong partisipan untuk menjadi patuh. Sebagai contoh, adalah dengan cara merubah kebijakan retaliasi menjadi pembayaran denda ala WTO. Hukuman yang lebih membawa kerugian bagi partisipan akan diperlukan untuk menyuport kepatuhan nya.<sup>37</sup>

Dalam teori rezim sebagai pendorong kerjasama, poin satu atau perihal pengurangan insentif untuk melukai dan memberikan kerugian bagi partisipan, hingga memperpanjang tabir masa depan yang tidak diketahui, 'kerugian' yang dimaksud dapat bersifat kerugian materiil maupun non materiil seperti kehilangan

---

<sup>37</sup> Tallberg, 2002, hal 612; Down et al 1996. 'The more extensive the behavioral changes required by international rules, the greater are the incentives to shirk. Or in other mean 'the deeper the agreement is, the greater the punishment required to support it'

pemasukan hingga kehilangan nama baik karena menyalahi norma dan aturan yang berlaku<sup>38</sup>.

Meskipun demikian, menurut Young dan Levy, negara partisipan dalam Rezim yang bersifat mendorong kerjasama ini masih dapat melakukan ketidakpatuhan, namun ketidakpatuhan ini bersifat tidak sengaja (inadvertent).<sup>39</sup> Merujuk pada niat baik institusi dan partisipan, hal ini disebutkan Young dan Levy dalam bukunya (1999), “effectiveness of international institution varies directly with the capacity of the governments of members to implement their provision.” yang mana apabila terjadi suatu ketidakpatuhan penyebabnya dapat dikaitkan dengan kapasitas negara dalam menjalankan kewajiban behavioral tersebut, bukan niatnya.<sup>40</sup>

#### 1.4.2 Konsep Perubahan Rezim

Menurut Krasner, perubahan rezim meliputi perubahan yang terjadi dalam peraturan dan proses pembuatan keputusan.<sup>41</sup> Meskipun demikian, menurut Bodansky dan O'Connor perubahan dalam rezim adalah perubahan yang membantu menginisiasi proses perubahan perilaku peserta suatu rezim. Meskipun tidak mengikat, perubahan rezim mampu meningkatkan kewaspadaan publik, serta membantu menciptakan ketaatan politis, perubahan juga bisa dialamatkan pada peraturan rezim yang berujung pada implementasi domestik, ataupun menciptakan mekanisme untuk meninjau performa pesertanya, untuk menekankan

---

<sup>38</sup> Young, 1999

<sup>39</sup> Young, 1999

<sup>40</sup> Young, 1992, hal 183

<sup>41</sup> Krasner, 1982.

peraturan yang legal. Definisi Krasner dan Bodansky beririsan pada peraturan yang mendefinisikan perubahan rezim meskipun demikian penulis menggunakan definisi keduanya, yaitu perubahan peraturan, proses pengambilan keputusan hingga penekanan implementasi peraturan melalui peraturan yang mengalami perubahan.

### 1.5 Hipotesis

KPCS adalah rezim pendorong kerjasama dengan memenuhi kriteria rezim pendorong kerjasama dari postulat Young dan Levy yaitu bertujuan untuk mengeliminasi permasalahan kolektif, dan membuat partisipan mendapatkan hasil kolektif serta memiliki cara untuk mengurangi insentif RoC dan memiliki skema yang didesain untuk meningkatkan transparansi perilaku aktor yang mana berkontribusi terhadap kepatuhan RoC pasca 2004 – 2007.

### 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian Kualitatif, yang memiliki ciri *Setting* atau latar alamiah bersifat holistik meskipun demikian dibatasi oleh fokus dan menggunakan Instrumen penelitian yaitu manusia. Metode utama adalah pengumpulan data observasi dan setelahnya dianalisis secara deduktif.<sup>42</sup>

Penelitian ini adalah penelitian dengan tipe eksplanatif atau penelitian yang menjabarkan hubungan antar dua variabel dan memberikan penjelasan kausalitas. Penelitian eksplanatif juga digunakan untuk mendukung prediksi,

---

<sup>42</sup> Efianingrum, 2011. Seminar Sosiologi.

menghubungkan isu atau topik, mendukung prediksi dan mencari sebab dan alasan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi.<sup>43</sup> Tipe penelitian ini dipilih penulis karena dirasa paling tepat dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas, yang mana akan menjadi tepat untuk menjelaskan antar variabel dalam topik yang diinginkan peneliti.

Dalam pengolahan data, komparasi data dalam fokus: transparansi rezim dan keputusan rezim untuk menyakiti partisipan (hukuman) akan diperlihatkan dalam data tahunan. Pengelompokan data struktur tentang cara rezim mengurangi insentif partisipan dan meningkatkan transparansi akan dipilah pilah dalam kolom tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, sehingga dari data tersebut akan mudah dilihat bagaimana perubahan rezim tersebut dalam rangka menciptakan kepatuhan pada RoC.

## **1.7 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.1 Kepatuhan terhadap rezim (Compliance)**

Berdasarkan definisi Oran Young, kepatuhan terhadap rezim adalah peristiwa yang terjadi ketika perilaku subjek aktual sama dengan perilaku yang dipreskripsikan, sebaliknya ketidak patuhan (Non - Compliance) atau pelanggaran terjadi ketika perilaku aktual menyimpang dari perilaku yang dipreskripsikan.<sup>44</sup>

Dalam KPCS kepatuhan diukur dengan perilaku subyek terkait kewajiban behavioral berupa persyaratan maupun peraturan di dalam KPCS, berikut asistensi

<sup>43</sup> Prasetyo dan Jannah, 2008 hal 43.

<sup>44</sup>Young, 1979 hal. 172

dan saran tim peninjau pada negara yang terkena kasus ketidak patuhan berat seperti RoC. Persyaratan KPCS sendiri diatur dalam Annex dan dokumen inti KPCS. Persyaratan tersebut termasuk diantaranya adalah Transparansi Statistik Produksi<sup>45</sup>, melakukan pemantauan internal terhadap proses penambangan berlian berikut ekspor nya, serta mengeluarkan sertifikat untuk berlian mentah yang akan diekspor. Persyaratan ini tidak dijalankan oleh RoC pada awalnya hingga berujung kepada diterbangkannya tim peninjau ke RoC.

Merujuk kepada definisi kepatuhan menurut Young, kepatuhan diartikan sebagai preskripsi yang diberikan rezim kepada partisipan yang berarti dapat diukur dengan 1.) Melihat sejauh mana persyaratan minimum rezim dilakukan pasca preskripsinya 2.) Regulasi dan hukuman yang dijatuhkan pada RoC selepas sebuah pelanggaran dikenali, apakah hukuman tersebut dijalankan atau dilanggar 3.) Preskripsi institusi untuk RoC yang mana dilakukan untuk memperbaiki persyaratan minimum yang dapat berbentuk preskripsi tim peninjau atas kasus RoC maupun keputusan pemilihan yang dibuat institusi.

### **1.7.2 Skema untuk meningkatkan transparansi aktor**

Menurut Chaplin, skema adalah suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang tersusun rapi, skema juga dapat diartikan sebagai kerangka referensi untuk merekam berbagai peristiwa atau data, skema juga dapat diartikan

---

<sup>45</sup> Dokumen Resmi Kimberley process, Seksi Vb Annex III



sebagai suatu model atau kerangka referensi yang terdiri atas respon respon yang pernah diberikan, kemudian menjadi standar bagi respons respons selanjutnya.<sup>46</sup>

Sementara transparansi adalah penyebaran dari informasi yang regular dan akurat, atau politik rezim yang transparan, satu yang mana memberikan informasi akurat tentang keberadaannya, operasinya dan negara yang terlibat atau mengizinkan informasi yang ada untuk dikumpulkan dan dibuat terlihat<sup>47</sup>. Sementara menurut Rosendorf dan Vreeland, transparansi yang lebih mengindikasikan informasi yang lebih<sup>48</sup>. Sementara menurut Bueno de Mesquita, Smith, Siverson, dan Morrow (2003) transparansi adalah ‘public good’ yang didefinisikan sebagai akses yang tersedia tentang informasi bagaimana dan apa yang sedang dilakukan pemerintah atau institusi<sup>49</sup>. Mitchell dalam Rosendorf dan Vreeland juga menyebutkan bahwasanya transparansi bersifat krusial dalam sebuah operasi, dengan melakukan *study case* terhadap transparansi IMF dan kredibilitasnya pada tahun 1998<sup>50</sup>. Sementara menurut Candeub mayoritas akademisi juga mendefinisikan transparansi sebagai akses pada informasi<sup>51</sup>.

Sementara skema yang meningkatkan transparansi aktor dalam definisi Chaplin dan Mitchell dapat diartikan sebagai kerangka model yang terdiri atas respons respons yang pernah diberikan, kemudian menjadi standar bagi respons respons di masa depan yang mana standar model respon (skema) ini dapat meningkatkan mengalirnya informasi tentang institusi dan apa yang sedang

<sup>46</sup> Chaplin, 1981.

<sup>47</sup> Mitchell, 1998. Hal. 109

<sup>48</sup> Rosendorf, Vreeland and Hollyer, 2013. hal. 2 – 5

<sup>49</sup> Mesquita, Smith, Siverson, dan Morrow, 2003. Hal. 179

<sup>50</sup> Rosendorf dan Vreeland, 2004. Hal. 6

<sup>51</sup> Candeub, 2013. Hal. 387

dilakukan oleh institusi, atau mempermudah akses tentang informasi sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih terkait institusi dan segala relasi yang ingin kita ketahui antara institusi, aktivitas partisipan atau hubungan keduanya. Menurut Mitchell, bertambahnya transparansi juga dapat diukur dengan berkurangnya sesuatu yang biasanya dipertimbangkan sebagai halangan bagi penelitian lintas negara, yaitu data yang hilang<sup>52</sup>.

Semakin transparan sebuah rezim maka semakin jelas agendanya, operasional dan informasi informasi terkait negara dan rezim tersebut. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Young dan Levy, yang menyatakan bahwa semakin transparan mekanismenya maka negara negara akan menjadi semakin patuh karena ketakutan untuk dicurangi menghilang seiring dengan transparansi yang bertambah.<sup>53</sup> Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kepatuhan yang bertambah dalam koridor rezim pendorong kerjasama adalah bukti bahwa skema yang dijalankan adalah skema yang dapat meningkatkan transparansi aktor.

### **1.7.3 Pengurangan Insentif untuk melukai aktor**

Pengurangan insentif untuk melukai aktor dalam rezim disebut juga hukuman, atau sangsi<sup>54</sup> (punishment, sanction), dan dijatuhkan karena persyaratan minimum ataupun pelanggaran terkait kewajiban behavioral dilanggar oleh partisipan.

---

<sup>52</sup> Mitchell, 1998. Hal. 109

<sup>53</sup> Young, 1999.

<sup>54</sup> Young, 1999.

Insentif sendiri secara harfiah dan praktek memiliki arti yaitu ‘sesuatu yang memotivasi aktor untuk melakukan sesuatu’.<sup>55</sup> Dalam fungsi ekonomi, insentif dapat disebut sebagai keuntungan, hadiah, atau biaya yang memotivasi aksi ekonomi. Secara natural individu maupun aktor dengan alasan apapun akan berharap untuk mendapatkan keuntungan atau kelebihan dari keputusan dan aksi mereka. Bahkan sebelum menjual sesuatu, individu cenderung memperhitungkan bagaimana barang tersebut akan membantu mereka mendapatkan sesuatu.<sup>56</sup>

Rezim dengan tipe pendorong kerjasama melakukan pengurangan insentif untuk partisipan sebagai cara menghukum atau memperpanjang tabir masa yang tidak diketahui, untuk meluruskan perilaku menyimpang yang didasarkan pada kesalahan partisipan, bukan kesalahan akibat penyimpangan niatan.<sup>57</sup> Sesuai dengan definisi Young, pengurangan insentif dalam rezim untuk melukai aktor dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan menghukum dan dengan cara “memperpanjang tabir yang tidak diketahui” yang berarti tanpa bergabung dengan rezim akan timbul selubung yang membuat masa depan partisipan menjadi lebih bersifat tidak jelas baik nasib ataupun kelanjutan dari aspek yang diatur oleh rezim atas negara partisipan.

Dalam kemampuan rezim yaitu menghukum, ada banyak variasi dalam eksekusinya, dapat berupa pembayaran denda, ataupun aksi retaliasi seperti prinsip WTO. Keduanya tentu saja memberikan konsekuensi yakni berkurangnya insentif yang didapat oleh partisipan, baik berupa uang hingga nama baik.

---

<sup>55</sup> Whatiseconomic.org. t.t

<sup>56</sup> Whatiseconomic.org. t.t

<sup>57</sup> Mitchell, 1998. Hal. 109

Hilangnya insentif ini kemudian memiliki efek terhadap kepatuhan rezim, sehingga partisipan yang menggantungkan diri pada keuntungan yang didapat dari insentif akan cenderung patuh pada rezim.<sup>58</sup>

Menurut Young, cara untuk menghilangkan insentif partisipan adalah dengan menjatuhkan hukuman pada partisipan serta memperpanjang tabir yang tidak diketahui terhadap masa depan partisipan.<sup>59</sup> Kata lain dari istilah ‘memperpanjang tabir yang tidak diketahui terhadap masa depan partisipan’ ini juga setara dengan hukuman berbentuk eksklusi, atau embargo. Eksklusi diartikan oleh Robin Peace sebagai “kurangnya pengakuan”, yang mana berarti subyek terkait dipandang secara negatif karena hal ini, mendapatkan diskriminasi sosial, mendapatkan ketimpangan kultur maupun perlakuan, prasangka buruk dari lingkungan sosial yang lebih luas, permusuhan, mendapatkan stigma, dan juga bersifat segregasi hingga derajat partisipasi subyek menjadi rendah atau terenggut.<sup>60</sup>

#### 1.7.4 Berlian Konflik

Secara umum berlian adalah substansi terkeras di dunia yang terbentuk dari kristalisasi karbon berbentuk tetrahedral dengan jarak atom karbon  $1.544 \times 10^{-10}$  meter antar satu sama lain dengan struktur rantai C-C-C yang membentuk sudut 109.5 derajat. Hal ini berakibat pada kohesi antar atom yang sangat kuat, dan

---

<sup>58</sup> Mitchell, 1998. Hal. 109

<sup>59</sup> Young, 1999.

<sup>60</sup> Peace, 1999 hal. 389

munculnya struktur kesatuan atom yang mewujudkan fisiknya yang berbentuk tiga dimensi<sup>61</sup>.

Yang membedakan berlian dengan batu mulia lain adalah kemurniannya yang hanya berasal dari karbon, berbeda dengan batu mulia lain yang tercampur bahan baku (zat) lain pembuatannya<sup>62</sup>. Sementara berlian yang berwarna menandakan ada senyawa yang terperangkap saat kristalisasinya terjadi, seperti Boron atau nitrogen<sup>63</sup>. Hasil bentukan karbon yang lain dengan tekanan yang tidak memadai menghasilkan kristalisasi yang strukturnya berbeda yang disebut grafit dan bersifat jauh lebih empuk dengan warna yang gelap, berlapis lapis, keruh dan kepadatan gram per sentimeter yang jauh lebih kecil dari berlian.<sup>64</sup> Batu permata selain berlian adalah bentukan dari dua zat yang berbeda, terlepas dari senyawa yang memberikannya warna, contohnya adalah batu Safir yang terbentuk dari Corundum dan Aluminium oksida, sementara warnanya ditentukan oleh senyawa titanium yang terperangkap saat pembentukannya<sup>65</sup>.

---

<sup>61</sup> Glusker, Lewis and Miriam Rossi, 1994. (Penulis dari artikel, Miriam Rossi adalah profesor kimia di Universitas Vassar, Amerika Serikat )

<sup>62</sup> Kiefer, 2015

<sup>63</sup> Wentorf dan Bovenkirk, 1987

<sup>64</sup> Glusker, Lewis and Miriam Rossi, 1994. (Penulis dari artikel, Miriam Rossi adalah profesor kimia di Universitas Vassar, Amerika Serikat )

<sup>65</sup> Wentorf dan Bovenkirk, 1987



*Gambar 2.1 Berlian dan berbagai macam batu mulia*



*Gambar 2.2 Proses pemolesan berlian*

Sumber : Website penjualan dan demonstrasi berlian, Sodahead.com dan Heartsonfire.com

Sementara lebih jauh, kategori berlian konflik menurut definisi Diamond Facts, sebuah organisasi dibawah naungan WDC (World Diamond Council), adalah berlian ilegal yang diperdagangkan untuk mendanai konflik di daerah yang dilanda perang.<sup>66</sup>

Apabila dibandingkan dengan definisi majelis umum PBB, berlian konflik adalah berlian yang berasal dari area yang dikendalikan oleh kekuatan oposisi terhadap legitimasi pemerintah yang diakui secara internasional, dan digunakan untuk mendanai aksi militer terhadap pemerintahan tersebut, atau mendanai aksi militer yang bersifat kontra terhadap keputusan PBB.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Diamondfacts.org

<sup>67</sup> Collins, 2010. "What are blood diamonds?"

Sementara itu, menurut KPCS definisi Berlian Konflik hampir serupa dengan definisi PBB sesuai dengan kesepakatan dalam pembentukan KPCS pada tahun 2000 yaitu, berlian mentah yang diperdagangkan secara terlarang oleh gerakan pemberontak untuk membiayai upaya mereka dalam menggulingkan pemerintah berdaulat<sup>68</sup>. Definisi KPCS secara umum lebih spesifik yakni ‘berlian mentah’, dibandingkan dengan definisi PBB yang mencakup semua berlian. Sehingga sesuai dengan KPCS definisi berlian konflik hanya mungkin disematkan pada berlian kasar, yang belum di potong ataupun di poles<sup>69</sup>. KPCS juga menambahkan lagi definisi berlian konfliknya sesuai dengan skema sertifikasi berlian kasarnya sehingga berlian kasar yang tidak mengantungi sertifikat KPCS juga digolongkan sebagai Berlian Konflik<sup>70</sup>.

Menurut penulis, definisi berlian konflik ala KPCS bersifat lebih spesifik karena tentara oposisi di Afrika memiliki kebiasaan untuk menyelundupkan berlian mentah, daripada di poles terlebih dahulu<sup>71</sup>. Hal ini juga dikarenakan negara negara Afrika jarang yang memiliki tempat pemolesan dan hanya fokus pada upaya penambangan mentah, kecuali di Afrika Selatan, sementara tempat pemotongan dan pemolesan secara umumnya berada jauh di Antwerp, Tel Aviv maupun India<sup>72</sup>.

## 1.8 Variabel Penelitian

<sup>68</sup>Dokumen resmi Kimberley Process. Ministerial Meeting, 2000.

<sup>69</sup> Kimberleyprocess.com

<sup>70</sup> Kimberleyprocess.com

<sup>71</sup> Harden, “Africa’s Diamond Wars”

<sup>72</sup> Hussain, “On Diamonds Journey: On the Cutting edge.” (dalam MNBC news)

Dalam penelitian eksplanatif, variabel bersifat plural dan memiliki keterkaitan kausalitas yang akan dihubungkan.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini ada Variabel bebas dan Variabel terikat. Variabel terikat adalah kepatuhan yang dilakukan oleh RoC sementara variabel bebasnya adalah Skema KPCS yang transparan dan keputusan KPCS untuk melukai partisipan dalam rangka mengurangi insentifnya.

### **1.8.1 Jangkauan Penelitian**

#### **1.8.1.1 Waktu**

Kasus ekspor berlian konflik yang dilakukan ROC terjadi pada tahun 2004, berikut dengan diterbangkannya tim peninjau ke RoC pada tahun yang sama menandai batas terdini dilakukannya penelitian ini. Penelitian dilakukan selama 2004 – 2007 , atau hingga ROC dinyatakan patuh pada semua persyaratan atau preskripsi tim peninjau. Meskipun demikian, tahun 2003 tetap diteliti oleh penulis sebagai bahan untuk mempertimbangkan garis awal kondisi rezim sebelum mengalami perubahan terkait variabel bebasnya .

#### **1.8.1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada sudut pandang rezim atau secara struktur, dengan demikian obyek dari penelitian ini adalah rezim, secara mendalam yaitu tentang perubahan transparansi dan praktik kemampuannya dalam mengurangi insentif partisipan sebagai bentuk hukuman, yang mana menciptakan kepatuhan RoC di kemudian hari.

---

<sup>73</sup> Bungin, 2006 hal. 38



### 1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian kualitatif ada tiga tipe data yaitu data hasil pengamatan yang meliputi: uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati di lapangan, data hasil pembicaraan yang meliputi: kutipan langsung dari pernyataan pernyataan orang orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam, dan yang ketiga adalah bahan tertulis yang meliputi petikan atau keseluruhan dokumen, surat menyurat, rekaman dan kasus sejarah.<sup>74</sup> Ketiga tipe data ini kemudian dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa data yang didapat langsung dari aktor yang berkompeten dan terlibat dalam kasus. Sementara data sekunder didapatkan dari interaksi tidak langsung dengan narasumber, dengan kata lain segala bentuk sumber tidak langsung dan dapat ditemui dimana saja, seperti film dokumentasi hingga *literature review*.<sup>75</sup> Data primer sendiri dapat berupa interview maupun semua catatan interaksi langsung dengan nara sumber. Untuk data Primer penulis menggunakan Interview dalam surat elektronik untuk mendapatkan informasi dari sumber secara langsung.

Penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi KPCS seperti laporan Fowler , laporan tahunan , Annex dan dokumen inti chart

---

<sup>74</sup> Patton, 1990

<sup>75</sup> Sugiyono, 2012 hal. 308

dari ringkasan produksi pertambangan yang berasal dari ROC maupun US sebagai pemantau negara negara berkembang, berikut juga dengan analisis wawancara yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain. Penulis juga menggunakan *review scholar*, testimoni pelaku penyelundupan dan NGO pengamat berlian maupun Afrika. Selain itu penulis juga menggunakan sumber bacaan dari internet seputar kasus, juga dokumentasi yang diakses dari Youtube.

### **1.9 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah teknik analisa Kualitatif yang berpusat pada penyajian data, data yang berupa sekumpulan informasi akan disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data nya berupa teks naratif , catatan lapangan hingga penyajian matriks, grafik , jaringan atau bagan. Penulis juga melakukan upaya penarikan kesimpulan dari data yang disajikan yakni dengan cara penarikan kesimpulan secara terus menerus. Dari awalnya mengumpulkan data, mencari makna benda, mencari pola keteraturan dalam koridor teori, penjelasan dan konfigurasi yang memiliki peluang tinggi untuk hadir, alur sebab akibat dan proposisi, sehingga dari awal peneliti sudah memikirkan kesimpulan yang berasal dari penyajian data, dari proses pencarian makna, pola, dan konfigurasi maka kesimpulan akan menajam, meskipun demikian penelitian tetap terbuka dan skeptis, sehingga akhirnya kesimpulan menjadi jelas, detail dan kokoh.<sup>76</sup>

### **1.10 Sistematika Penulisan**

---

<sup>76</sup> Agusta, 2009 hal. 10

Bab 1 : Pendahuluan

Bab 2 : pembuktian KPCS selaku rezim pendorong kerjasama, dilihat dari efeknya terhadap konflik akibat berlian konflik, niatan rezim hingga aktor aktor lain yang turut membangun rezim KPCS sebagai perwujudan rezim sebagai pendorong kerjasama.

Bab 3 : Pembahasan poin nomor satu teori Young dan Levy tentang kemampuan rezim untuk mengurangi insentif partisipan. Akan dibahas pula bagaimana KPCS mengurangi insentif RoC, serta implikasinya pada RoC sehingga RoC menjadi patuh. Mengukur seberapa besar insentif RoC yang hilang, serta bagaimana dampaknya. Membahas pula kesalahan berupa ketidak sengajaan atau mis-manajerial yang dilakukan RoC sehingga sektor berlian domestiknya terjamah berlian konflik.

Bab 4 : Pembahasan tentang poin nomor dua Young dan Levy yaitu bagaimana transparansi bekerja pada partisipan rezim dan imbasnya pada kepatuhan, serta pembahasan bagaimana perubahan transparansi di KPCS sejak 2004 hingga 2007, berikut efeknya.

Bab 5 : Kesimpulan.